



Jumlah Gedung...

Kepala Program Studi Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia (UII) Suparwoko menyebutkan pemenuhan standar aksesibilitas sebuah bangunan perlu diiringi dengan perhitungan berapa jumlah difabel yang berani keluar rumah dan berkegiatan sesuai kemampuannya.

"Aksesibilitas difabel sangat penting. Di Jogja sudah banyak fasilitas itu di mal-mal besar. Namun yang lebih penting itu seberapa banyak difabel yang keluar rumah?" kata dia ketika ditemui di ruang kerjanya di UII pada Kamis (9/11). Hal ini penting karena dari data tersebut dapat dilihat apakah fasilitas pada bangunan tersebut menjadi efektif atau tidak.

"Saya tidak menolak adanya akses pada bangunan yang ramah disabilitas, bukan lalu kalau tidak ada yang pakai [fasilitas itu] lalu enggak perlu ada. Sebaiknya pemerintah tak hanya buat aturan, tapi bagaimana komunitas [difabel] itu bergerak gitu lho, *moveable*. Mungkin [mereka tidak keluar] karena ketidakmampuannya beli kursi roda atau apa gitu. Padahal saya rasa perlu didata, setiap hari berapa sih difabel yang menggunakan fasilitas yang diberikan itu secara efektif?" jelas Suparwoko.

Dari data Dinas Sosial DIY, ada sebanyak 1.967 difabel di Kota Jogja dari berbagai usia dan kondisi. Menurut Suparwoko dari data tersebut perlu diketahui berapa penyandang disabilitas yang sudah mampu keluar rumah secara mandiri. Jika belum maka faktor apa yang memengaruhinya. Sehingga, menurutnya lagi, pengadaan sarana dan prasarana untuk aksesibilitas menjadi efektif. Ia melihat beberapa negara

maju sudah menerapkan budaya inklusif pada masyarakatnya. "Di Barcelona dan Australia saya lihat difabel sudah bisa keluar rumah dan beraktivitas secara mandiri." Ia menambahkan, jika komunitas difabel sudah bisa beraktivitas secara mandiri, maka bangunan itu akan menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya.

Target Tak Ada

Dria Manunggal sebagai sebuah lembaga kajian tentang disabilitas untuk transformasi sosial beberapa kali mengajukan usulan ke pemerintah terkait dengan aksesibilitas bangunan ramah disabilitas. Ketua Dria Manunggal, Setya Adi Purwanta mengatakan selama ini bangunan di Kota Jogja masih belum ramah bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, meskipun peraturan terkait standar pembangunan yang mengedepankan aksesibilitas sudah dibuat, tetapi belum ada realisasinya.

"Peraturannya ada, tapi target pemenuhannya itu belum ada. Kalau memenuhi semua ya belum bisa, tapi sekarang [proses] bertahapnya seperti apa? Target tahapannya belum *clear* [jelas]," ujarnya kepada *Harian Jogja* belum lama ini.

Beberapa kali Dria Manunggal mengadakan diskusi dengan beberapa *stakeholder* terkait dengan aksesibilitas peribadatan. Rumah ibadah seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemeluknya, apa pun kondisinya. Meski belum maksimal, Masjid Jogokariyan di Kota Jogja merupakan salah satu rumah ibadah yang peduli dengan penyandang disabilitas dan warga lansia. Di sana, telah disediakan *ramp* dengan *hand rail* yang memungkinkan kursi roda

untuk naik ke area masjid serta kursi untuk para lansia.

Keluhan yang sama dilontarkan Ndaru Patma, 26, seorang atlet yang sempat aktif di LSM Saujana. Ndaru mengaku beberapa kali melakukan asesmen di lapangan terkait gedung pemerintahan yang belum ramah disabilitas. Seperti gedung yang belum dilengkapi *ramp* dan *stairway* untuk memudahkan akses mereka. "Kami sudah mengadvokasi juga melalui Dinas Sosial yang bekerja sama dengan DPUPKP. Ada yang langsung merespons tanggapan kami, langsung bikin fasilitas yang diminta, ada yang mengabaikan," kata Ndaru.

Ndaru tak menampik, saat diundang ke zona pemerintah di salah satu gedung pemerintahan. Masih ada pihak yang kerap mengundang mereka di lantai dua. Padahal gedung tersebut tidak difasilitasi *lift*, *ramp* maupun *stairway*. "Waktu itu akhirnya kami boikot, kalau kami enggak diangkat, kami enggak mau datang," kata Ndaru.

Kedua itu berbanding terbalik dengan apa yang mereka rasakan terhadap fasilitas gedung milik swasta. Seperti mal, supermarket dan bioskop. Mereka justru mendapat *space* khusus dan fasilitas yang memudahkan akses mereka cukup lengkap. Seperti *ramp*, *stairway* dan *lift*. Mereka berharap, gedung di tingkat pemerintah kecamatan dan gedung pemerintah dapat mencontoh pihak swasta.

"Sebenarnya kami enggak perlu fasilitas mahal. Minimal kalau mengundang teman-teman difabel ke gedung berlantai dua, kalau tidak ada *lift*, ya mengundangnya di lantai satu saja," kata Ndaru.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005